

PENGUNAAN ISTILAH *GRIYA, PURI, DAN JERO*, SEBAGAI NAMA KOMPLEKS PERUMAHAN MASA KINI: PERSPEKTIF PERGULATAN IDENTITAS

I Putu Gede Suyoga

Sekolah Tinggi Desain Bali, Denpasar, Bali - Indonesia

e-mail: gsuyoga@std-bali.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Received : September, 2019
Accepted : September, 2019
Publish online : Oktober, 2019

ABSTRACT

Griya, Puri, and Jero are terms specifically used to name the dwellings of Balinese aristocrats, namely Brahmana, Ksatrya, and Wesia. These three groups of people are the highest group in the social structure of traditional Balinese society respectively, also called tri wangsa. This study aims to uncover the identity struggle with the use of the names of the residential groups of citizens of the tri wangsa or the Balinese aristocracy into the names of today's housing developed by developers in Bali. This qualitative study with an interpretive descriptive approach uses Bourdieu's structural generative theory and Foucault's knowledge-power in relation to the analysis of primary data obtained from the fieldwork, and interviews with individuals determined by purposive sampling and secondary data based. Data collection was carried out through literature study and interviews. The study's findings show that in Foucault's view, the use of traditional aristocrats' dwellings name is a new articulation that has articulated an earlier truth claim that has been established for about six centuries. It is also inseparable from the struggle for economic capital, cultural capital, social capital, and especially symbolic capital. The struggle of various capital in Bourdieu's perspective with its various forms of conversion also becomes a struggle for identity in the field of social struggle through the realm of residential society in Bali today.

Keywords: *Griya, Puri, Jero, Balinese aristocrats, housing.*

ABSTRAK

Griya, Puri, dan Jero merupakan istilah yang dipergunakan secara spesifik untuk menamai hunian kaum bangsawan Bali, yakni warga Brahmana, Ksatrya, dan Wesia. Ketiga kelompok warga ini merupakan kelompok warga tertinggi dalam struktur sosial masyarakat tradisional Bali, yang juga disebut tri wangsa. Studi ini bertujuan untuk mengungkap pergulatan identitas dengan penggunaan nama hunian kelompok warga tri wangsa atau kaum bangsawan Bali ini menjadi nama-nama perumahan masa kini yang dikembangkan oleh para

pengembang di Bali. Studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif ini, mempergunakan teori struktural generatif Bourdieu dan relasi pengetahuan-kekuasaan Foucault dalam analisis data primer yang didapat dari lapangan, dan dari hasil wawancara dengan informan yang ditentukan dengan *purposive sampling* serta berbasis data sekunder. Kolekting data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Temuan studi menunjukkan dalam pandangan Foucault, penggunaan nama-nama hunian kaum bangsawan tradisional Bali ini merupakan artikulasi baru yang telah mendisartikulasi klaim kebenaran sebelumnya yang sudah berjalan mapan sekitar enam abad. Hal ini juga tidak terlepas dari pergulatan modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan terutamanya modal simbolik. Pergulatan berbagai modal dalam perspektif Bourdieu dengan berbagai bentuk konversinya ini, juga menjadi pergulatan identitas dalam medan perjuangan sosial melalui ranah hunian masyarakat Bali masa kini.

Kata Kunci: *Griya, Puri, Jero*, Bangsawan Bali, perumahan.

PENDAHULUAN

Struktur tradisional masyarakat Bali pada era Bali Pertengahan (1348-1906) atau disebut juga era Bali Arya atau Bali Majapahit, membagi masyarakat Bali secara solid menjadi empat strata yakni kelompok *Brahmana*, *Ksatrya*, *Wesia*, dan *Sudra*. Strata sosial ini merupakan pemaknaan ulang dari konsep catur warna dalam kitab suci Weda yang menempatkan masyarakat sesuai fungsi dan peran mereka bagi kehidupan. Siapa saja yang berhasil mengembangkan diri menguasai bidang keahlian pengetahuan suci, dan mengabdikan hidup untuk pelayanan umat melalui pengetahuan ketuhanan (*Brahman*) disebut golongan *Brahmana*. Bagi mereka yang memiliki keahlian dan fungsional di bidang kepemimpinan, pemerintahan, administrasi, strategi perang, berjiwa patriot pejuang, maka akan masuk kelompok *Ksatrya*. Selanjutnya bagi mereka yang fungsional dalam bidang peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat melalui perdagangan, *entrepreneurship* 'kewirausahaan', maka akan tergolong kaum *Wesia*, sedangkan bagi kelompok masyarakat yang hanya mampu membantu dengan kekuatan otot tanpa banyak pemikiran, maka akan digolongkan kaum *Sudra*.

Rupanya sesampainya di Nusantara termasuk berkembang pesat pasca pengaruh kerajaan Majapahit atas Bali tahun 1343 M, konsep *catur warna* telah mengalami perubahan makna yang sangat mendasar, bahkan lebih dipertegas kembali pada era kolonialis di Bali tahun 1908. Konsep *catur warna* lebih dipahami sebagai konsep *catur kasta* dan berkembang mapan bahkan sampai pasca kemerdekaan Indonesia

sekitar enam abad. *Catur kasta* yang dipahami sebagai wangsa atau garis keturunan, membagi masyarakat tradisional Bali menjadi kelompok *tri wangsa* yakni terdiri dari kaum *Brahmana* keturunan Danghyang Nirartha, kaum *Ksatrya* yakni keluarga Dalem Klungkung (raja di raja Bali) bersama kelompok warga *arya* yang datang dari Majapahit), dan *Wesia* (para menteri dan pegawai bawahan kerajaan) dan kelompok warga Bali Kuno yang dianugrahi gelar kebangsawanan oleh Dalem Klungkung. Sedangkan kelompok masyarakat Bali Mula, Bali Aga, *Ksatrya* Bali Kuno, warga keturunan *Sapta Rsi* (*Brahmana* Bali Kuno) yang dianggap kalah perang, diturunkan strata sosialnya (*patita wangsa*) sebagai rakyat biasa, dan termasuk warga Bali Kuno lainnya yang *nyineb wangsa* (menyembunyikan status kebangsawanan).

Kelompok masyarakat tradisional Bali yang tergolong *tri wangsa* (*Brahmana*, *Ksatrya*, dan *Wesia*) menempati hunian berturut-turut dengan nama *Griya*, *Puri*, dan *Jero* [1]. Ketiga tempat hunian ini dipahami sebagai *jeroan* (hunian sisi dalam), sedangkan tempat tinggal kelompok rakyat biasa disebut *Umah*, dan dianggap berada di sisi luar atau *jaba*, sehingga warganya disebut *jaba wangsa* yang secara politis disetarakan dengan *Sudra*. Hunian masyarakat tradisional Bali, dengan demikian telah terjadi dikotomi yang tegas antara *jeroan-jaba* atau dalam konteks hunian antara *Griya*, *Puri*, *Jero* dengan *Umah*. Dikotomi sosial ini sangat berpengaruh secara arsitektural, yakni segala elemen arsitektural *tri wangsa*, akan sangat berbeda dengan *jaba wangsa* yang umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan peternak [2].

Rumah tinggal *jaba wangsa* relatif lebih kecil dari sudut dimensi rancang bangunnya, sehingga tata ruang dan tata bangunnya akan tampil lebih mungil dibandingkan dengan keluasan lahan dan struktur bangunan *tri wangsa*, demikian juga dalam hak pemakaian tipe bangunan, jenis bangunan, dan bahan bangunan sudah diatur sangat ketat dalam pakem rancang bangun tradisional. Panduan bangunan-membangun tradisional ini di antaranya: *Asta Bumi* 'lahan', *Asta Kosala-Kosali* 'rancang bangun', *Yama Tattwa* 'bangunan kematian', *Dewa Tatwa* 'bangunan suci', *Janantaka* 'pilihan kayu', *Wariga* 'ketentuan baik-buruk hari' khususnya untuk membangun

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Teori struktural generatif Bourdieu [3] dan relasi pengetahuan-kekuasaan Foucault [4] digunakan dalam analisis data primer yang didapat dari lapangan, dan dari hasil wawancara dengan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (*undagi/arsitek, developer 'pengembang', cendekiawan/akademisi*), serta berbasis data sekunder dari buku, jurnal, dan hasil penelitian. Kolektif data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika terbukti perubahan pemahaman *catur warna* menjadi *catur kasta* efektif dalam praksis menata stratifikasi masyarakat tradisional Bali. Rupanya ada sekelompok orang yang menangkap pengetahuan tersembunyi di balik wacana stratifikasi sosial tersebut dengan cara melontarkan wacana sekunder bahwa 'rancang bangun arsitektur tradisional Bali juga harus mengacu pada status sosial' yang dianggap suatu kebenaran.

Pengetahuan yang tersembunyi dibalik wacana sekunder tersebut lalu ditangkap lagi oleh begitu banyak pihak lain, sehingga muncul puluhan dan bahkan ratusan wacana tersier mengenai rancang bangun arsitektural yang dirangkum dalam berbagai lontar pakem arsitektural dan dilontarkan oleh praktisi bangunan tradisional. Wacana-wacana tersebut berkontestasi satu sama lain, yang menjadikan Bali bagaikan lautan wacana. Wacana-wacana

dan persiapan bahan bangunan, serta lontar yang lainnya.

Penamaan jenis hunian dan pakem arsitektur tradisional yang berbasis stratifikasi sosial masyarakat tradisional Bali ini dipahami sebagai sebuah artikulasi dalam terminologi pemikiran Foucault. Rupanya ada sekelompok orang yang menangkap pengetahuan tersembunyi dibalik wacana rancang bangun berbasis *tri wangsa-jaba wangsa* untuk dijadikan kekuasaan yang menarik dikaji dengan pendekatan Kajian Budaya, sehingga terungkap berbagai pergulatan identitas, resistensi identitas, pertarungan modal dalam konsepsi Bourdieu melalui ranah hunian masyarakat Bali.

tersebut menjadi landasan dalam praksis bangun-membangun di hunian masyarakat Bali.

Tokoh-tokoh pelontar wacana-wacana arsitektural tersebut di antaranya *undagi* 'arsitek tradisional', pengurus adat, rohaniawan dan cendekiawan-akademisi. Para tokoh ini berhasil menjadikan sebagian orang Bali patuh dan taat terhadap pengetahuan yang tersembunyi di balik wacana-wacana kearsitekturan tersebut. Pada intinya, pengetahuan itu mengajak orang-orang Bali memperkuat identitas ke-Hindu-an dan ke-Bali-annya supaya mampu menampilkan identitas ke-Bali-an arsitektur huniannya. Namun tanpa disadari oleh para pencetusnya, gerakan ini menelanjangi dirinya sendiri dengan memperlihatkan kedok aslinya, yakni demi dan untuk mempertahankan status *qou* sebagai bangsawan tradisional Bali, mempertahankan modal simbolik untuk menunjukkan kekuasaan atas modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya.

Lontar *Asta Kosala Kosali* [5] dan *Asta Bhumi* [6] menyebutkan "ini ukuran untuk *Brahmana, Ksatrya, Wesya, dan Prabali (jaba wangsa)*". Pedoman rancang bangun dalam lontar ke-arsitektur-an tradisional Bali atau *sukat-sikut* yang berbasis dikotomi *tri wangsa-jaba wangsa* dipahami sebagai satu-satunya kebenaran. Dalam bahasa Bourdieu, mereka tidak akan pernah tahu bahwa melalui wacana tersebut telah menjadikan wacana kebijakan rancang bangun (*sukat-sikut*) tersebut sebagai sebuah medan perjuangan sosial (*champ*) untuk nantinya tampil sebagai pemenang (status sosial

tinggi). Barker menyatakan melalui bahasa, makna diproduksi secara simbolik [7].

Jika bertolak dari pemikiran Derrida [8] oposisi biner, maka status tinggi dan rendah yang terkandung di dalam frase *tri wangsa-jaba wangsa* merupakan hierarki metafisik yang melekat pada bahasa, yang menempatkan secara sadar maupun tidak sadar konsep “tinggi” pada posisi yang lebih baik. Semua bentuk oposisi itu harus ditatap dengan curiga karena menyembunyikan hubungan dominasi dan hierarki. Setelah membalik hubungan hierarkinya, oposisi tersebut harus dinetralisir karena dia sama halnya dengan upaya membaku makna, sehingga pemahamannya menjadi normatif terhadap penafsiran-penafsiran lain. Begitu dia menetapkan diri sebagai norma atau ukuran, penafsirannya atas suatu hal menjadi otoriter, sehingga berkembang terorisme pemikiran.

Jadi, dengan menggunakan terminologi Derrida sebagai landasan berpikir, maka tidak ada lagi posisi biner seperti itu, karena setiap teks sebenarnya telah menelanjangi dirinya sendiri dan memperlihatkan di dalamnya terkandung terorisme pemikiran. Namun orang-orang yang pengetahuan, penalaran, dan pengalamannya belum dewasa tentunya tidak mampu menangkap makna itu, sehingga tetap percaya pengetahuan yang ada dibalik wacana *tri wangsa-jaba wangsa* sebagai satu-satunya kebenaran. Orang-orang yang sudah patuh dan disiplin itu tidak akan peduli pada terorisme pemikiran itu akan melahirkan perlawanan balik dari pemikir masa kini.

Perlawanan “pencairan” itu dapat dilihat dari munculnya wacana *Griya, Puri, dan Jero* sebagai nama kompleks perumahan atau hunian *massal* yang menjadi tempat tinggal multi-*wangsa* di masa kini. Contohnya perumahan Griya Asri Tabanan, Griya Kencana Toska Serongga Gianyar, Puri Mumbul Jimbaran, Puri Kedaton Tabanan, Puri Residence Kediri Tabanan, Puri Waturenggong Denpasar, Puri Gading Jimbaran, Jero Taman Tegeh Sari Denpasar, *The Jero Seminyak*, dan lainnya.

Peniruan nama hunian tersebut senada dengan istilah *mimikri* dalam pemikiran Homi K. Bhabha [9]. Hal ini dalam bahasa Bhabha, bukanlah peniruan biasa sebagai bentuk duplikasi semata, namun dapat dibaca sebagai bentuk resistensi

identitas kelompok baru yang memakainya. *Griya, Puri, dan Jero* sebagai nama-nama hunian yang eksklusif hanya bagi kaum *tri wangsa* pada awalnya, menjadi sebuah bentuk budaya yang kuat atau dalam bahasa Foucault dipahami sebagai sebuah artikulasi [10]. Artikulasi mengandung unsur mengekspresikan atau merepresentasikan sekaligus tindakan menyatukan, yakni suatu kesatuan sementara elemen-elemen yang sebenarnya tidak harus digabungkan [11]. Dalam konteks studi ini nama hunian *Griya, Puri, dan Jero* sudah “terartikulasi” dengan *tri wangsa*. Munculnya kembali *Griya, Puri dan Jero* sebagai nama hunian massal di Bali sejak abad ke-20 menjadi sebuah artikulasi baru. Artikulasi baru ini, dengan demikian telah mendisartikulasi struktur pemaknaan yang telah mapan sebelumnya.

Pemaknaan baru yang ingin ditampilkan para *entrepreneur* (wirausahawan) adalah bagi siapa saja yang mampu memiliki dan tinggal di hunian massal yang berlabel *Griya, Puri, dan Jero* menunjukkan kekuasaan atas empat modal dalam pandangan Bourdieu [12], yaitu: modal ekonomi (kemampuan finansial), modal sosial (keluasan relasi), modal budaya (tingginya pendidikan), dan modal simbolik (sebagai bangsawan Bali baru). Hal ini dalam pemikiran Danesi dipahami bahwa makna simbolik yang ingin dikembangkan adalah memperoleh keuntungan sosial berupa rasa hormat, kewibawaan, kekaguman atau semacamnya. Bangunan merupakan tanda identitas, status, kekuasaan, dan sebagainya. Bangunan dapat dibaca sebagai teks naratif dengan makna spesifik [13]. Hubungan bahasa dan kekuasaan sebagai hubungan kekuatan simbolis inilah selanjutnya disebut sebagai kuasa simbolik [14].

Jika berkiblat pada pemikiran Foucault tentang relasi pengetahuan-kekuasaan. Kekuasaan dalam arti tersebar ada di mana-mana dalam bentuk strategi, maneuver, dan taktik [15] [16], maka pengetahuan tersembunyi dibalik wacana ini kemudian ditangkap dan dijadikan kekuasaan oleh berbagai pihak. Para pihak tersebut di antaranya para *developer* ‘pengembang perumahan’, pihak kreditur perbankan, calon pembeli seperti kaum ekskutif muda ataupun yang senior, Orang Kaya Baru (OKB) dari hasil menjual/mengontrakkan lahan, dan calon

pembeli lainnya, termasuk calo/makelar tanah, serta pemilik lahan.

Kepemilikan keempat modal dalam pandangan Bourdieu tersebut memberi peluang lebih besar untuk mengambil peran dalam pertarungan kekuasaan di medan perjuangan sosial. Modal yang dimiliki pun masih bisa dikonversi dalam bentuk lain, seperti ke media informasi massa untuk mendukung peningkatan modal sosial maupun simbolik. Keberadaan perumahan dengan nama awal *Griya*, *Puri* dan *Jero* menjadi *prestise* tersendiri bagi pengembang, nilai bisnis perumahan itu sendiri, maupun bagi pemilik atau penghuninya.

KESIMPULAN

Pemakaian nama-nama hunian kaum *tri wangsa* (tiga kelompok bangsawan Bali) yang terdiri dari *Brahmana*, *Ksatria*, dan *Wesia*, dengan hunian berturut-turut dinamakan *Griya*, *Puri*, dan *Jero* sebagai nama hunian *massal* multi-*wangsa* atau perumahan masa kini, dapat dibaca sebagai peniruan (*mimikri*) yang bermakna resistensi halus atau “pencairan” terhadap identitas mapan, nama hunian dalam stratifikasi sosial tradisional Bali.

Hal ini juga tidak terlepas dari kuatnya pertarungan modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dengan berbagai konversi modal tersebut, utamanya untuk peningkatan modal simbolik berupa *prestise* (rasa hormat, kebanggaan, atau kekaguman) untuk meraih kuasa simbolik. Identitas karya arsitektur, khususnya dalam penamaan kompleks perumahan menjadi arena perjuangan kekuasaan atau medan perjuangan identitas. Para pihak yang menangkap pengetahuan di balik wacana pemakaian nama-nama hunian *tri wangsa* ini dan dijadikan kuasa di antaranya adalah para pengembang perumahan, perbankan, calon pembeli, calo lahan, dan pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gelebet, I Nyoman. 2002. *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Denpasar: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 36-37.
- [2] Ardika, I Wayan, I Gde Parimartha, A.A. Bagus Wirawan. 2015. *Sejarah Bali, dari Prasejarah hingga Modern*. Denpasar: Udayana University Press, hlm. 316-320.

- [3] Harker, Richard, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes. 2009. *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 16.
- [4] Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 180-185.
- [5] Tim Penyusun. 2007. *Asta Kosala Kosali*. Denpasar: Tim Alih Aksara, Alih Bahasa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, hlm. 17-18.
- [6] Tim Penyusun. 2007. *Asta Bhumi*. Denpasar: Tim Alih Aksara, Alih Bahasa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, hlm. 2-4.
- [7] Foucault, Michel. 1972. *The Archeology of Knowledge*. Terj. A.M. London: Tavistock, hlm. 88-105.
- [8] Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 123-124.
- [9] Lubis, Akhyar Yusuf. 2016. *Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 146-147.
- [10] Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian*. Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 138.
- [11] Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Terjem. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, hlm. 12.
- [12] Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian*. Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 45.
- [13] Danesi, Marcel. 2011. *Pesan, Tanda, dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 265.
- [14] Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 124.
- [15] Sarup, Madam. 2003. *Post-Structuralism and Postmodernism Sebuah Pengantar Kritis*. Yogyakarta: Jendela, hlm. 143.
- [16] Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian*. Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 15.